

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilaksanakan di Kelurahan Sawah Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan dapat diambil kesimpulan bahwa dalam analisis *collaborative governance* pada pelaksanaan Musrenbang terdapat beberapa temuan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Kelurahan Sawah sudah berjalan dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan beberapa indikator yang telah diperoleh yakni kondisi awal, desain kelembagaan, kepemimpinan fasilitatif dan proses kolaborasi. Disimpulkan bahwa :
 - a. Dilihat dari kondisi awal dapat dikatakan cukup optimal karena adanya pelaksanaan Pra Musrenbang yang dilaksanakan oleh Kelurahan Sawah. Dalam kondisi awal terlihat bahwa sebuah kolaborasi telah terbentuk sejak lama diantara pihak-pihak pelaksana Musrenbang, seperti kelurahan, RT, RW, Dinas terkait, BKM, Karang Taruna, dan masyarakat. Akan tetapi, masih terdapat perbedaan tingkat pemahaman masyarakat akan pelaksanaan Musrenbang, hal ini dapat menimbulkan konflik di masyarakat karena adanya perbedaan pendapat yang membuat masyarakat teguh akan pemahamannya. Kelurahan Sawah memiliki cara untuk menangani konflik yang terjadi yaitu dengan melakukan komunikasi secara *intens* antar para pemangku kepentingan.
 - b. Dilihat dari desain kelembagaan dapat dikatakan sudah baik karena adanya aturan-aturan dasar yang harus dipenuhi oleh para pemangku kepentingan. Aturan-aturan tersebut termuat dalam SOP Musrenbang. Aturan dan syarat dalam pengusulan Musrenbang juga

sudah diinformasikan secara jelas dan terbuka pada seluruh pihak pelaksana, sehingga pada pelaksanaannya para *stakeholders* dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya terhadap kegiatan Musrenbang.

- c. Dilihat dari kepemimpinan fasilitatif dapat dikatakan sudah optimal karena adanya penetapan persentase pembangunan dari pihak penyelenggara Musrenbang Kota Tangerang Selatan yaitu Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) yakni 60% pembangunan fisik dan 40% pembangunan kegiatan non fisik. Pelaksanaan Musrenbang sejalan dengan misi kelima Kelurahan Sawah yakni mengutamakan penyelesaian masalah dengan musyawarah mufakat.
- d. Dilihat dari proses kolaborasi dapat dikatakan sudah berjalan dengan baik karena terdapat partisipasi aktif dari para *stakeholders*. Terdapat sub indikator dalam proses kolaborasi yakni : 1) pertemuan tatap muka: Kelurahan Sawah telah menjalankan Musrenbang dengan pertemuan tatap muka, pertemuan dilakukan untuk saling berinteraksi dan berdialog satu sama lain agar timbul kesepahaman antar *stakeholders*. 2) membangun kepercayaan : upaya membangun kepercayaan yang dilakukan oleh Kelurahan Sawah adalah melalui pendekatan-pendekatan seperti sosialisasi, nyaba kampung, komunikasi secara *intens*, dalam pendekatan tersebut semua pihak akan merasa dilibatkan dan memunculkan rasa saling memahami dalam mencapai tujuan bersama. 3) Komitmen terhadap proses : para *stakeholders* telah memiliki kontribusi dan komitmen untuk berpartisipasi dalam memberikan ide usulan pembangunan, serta menjalankan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan tupoksi yang dimiliki. Komitmen tersebut akan menumbuhkan keinginan kuat dalam mencapai tujuan pembangunan yang akan menjadikan proses

collaborative governance berjalan efektif dan efisien. 4) pemahaman bersama: adanya kebebasan berpendapat dalam menyampaikan permasalahan-permasalahan masyarakat di lingkungannya. Masyarakat telah terlibat secara aktif dalam proses perencanaan pembangunan, walaupun masih terdapat masyarakat yang memiliki keterbatasan pengetahuan tentang kelengkapan dokumen karena format yang diusulkan harus jelas dan sesuai aturan. Keterlibatan ini akan dapat meningkatkan pembangunan di lingkungan masyarakat. 5) intermediate outcomes : format usulan musrenbang terdiri dari 20 usulan (F1) dan 20 usulan (F2).

2. Dalam pelaksanaan Musrenbang di Kelurahan Sawah terdapat faktor pendukung dan faktor penghambat yang bisa mempengaruhi pelaksanaan Musrenbang. Faktor pendukung pelaksanaan Musrenbang di Kelurahan Sawah yaitu adanya dukungan dan peran aktif dari setiap *stakeholders*, tersedianya pagu anggaran tiap kelurahan, perangkat daerah yang mendukung pelaksanaan Musrenbang dan melaksanakan usulan Musrenbang sesuai dengan prioritas, dan masyarakat yang terlibat dalam pelaksanaan Musrenbang sangat aktif. Faktor penghambatnya yaitu tidak semua usulan dapat terakomodasi, pemahaman dan pengetahuan masyarakat yang kurang terkait proses pengusulan Musrenbang, terbatasnya waktu pelaksanaan Musrenbang, dan pelaksanaan pembangunan yang tidak sesuai dengan waktu yang telah direncanakan.

B. Saran

Berdasarkan dari kesimpulan di atas, maka penulis memberikan beberapa saran terkait pelaksanaan Musrenbang dalam perspektif *collaborative governance*, khususnya di Kelurahan Sawah. Yakni sebagai berikut :

1. Bappelitbangda khususnya bidang Perencanaan Data dan Evaluasi Pembangunan agar lebih mengkoordinasikan dan mengarahkan para

pengusul jika terjadi permasalahan dalam usulan program. Dalam hal ini, peran bappelitbangda akan sangat dibutuhkan untuk memaksimalkan koordinasinya di tiap kelurahan dan kecamatan agar penyusunan usulan program sesuai dengan format perencanaan.

2. Lurah dan perangkat lurah agar selalu mendukung untuk meningkatkan kualitas implementasi Musrenbang, khususnya dalam memperhatikan masyarakat yang memiliki keterbatasan pengetahuan terhadap proses pengusulan karena pengetahuan masyarakat akan berdampak pada kualitas implementasi dalam proses perencanaan pembangunan. Hal tersebut dapat dilakukan dengan cara melakukan rapat evaluasi secara berkala dan terjadwal seperti dua kali dalam sebulan dengan mengundang para ketua lingkungan (RT/RW).
3. Inovasi kolaborasi lintas aktor melalui rembug RW yang dapat diadopsi dari DKI Jakarta, agar masyarakat menjadi lebih berinovasi dalam melakukan kerjasama dan memahami akan pentingnya pelaksanaan Musrenbang.
4. Pengembangan digitalisasi musrenbang melalui *website* yang dapat diadopsi dari DKI Jakarta, misalnya musrenbang.jakarta.go.id. Pengembangan digitalisasi dapat dilakukan dengan melakukan sosialisasi untuk tahap awal. Mengingat bahwa dalam pengusulan masyarakat hanya terbatas pada saat pelaksanaan Musrenbang berlangsung, melalui digitalisasi ini seluruh tingkatan masyarakat akan dapat menginput usulannya secara online yang tidak hanya tertampung pada saat pelaksanaan Musrenbang. Hal ini akan berdampak pada terintegrasinya aspirasi masyarakat dan dapat dibuktikan secara konkrit. Melalui sosialisasi yang merupakan tahapan awal, para pelaksana Musrenbang akan memiliki pemahaman bagaimana cara beraspirasi melalui sistem *online* (E-Musrenbang) yang pengusulannya akan dapat dilakukan setiap waktu.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Agranoff dan Mc.Guira dalam Chang (2009: 76-77) *catatan mahasiswa pidana*. Depok: indie publishing.
- Deddy T. Tikson. 2005. Indikator-indikator Pembangunan Ekonomi. <http://ecozon.html>. Diakses pada: Senin, 18 April 2011.
- Dwiyanto, Agus. (2015). *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Gillie, F.B. (1967), *Basic Thinking in Regional Planning*, The Hague: Mouton & Co.
- Hermawan, I. (2019). *Metodologi Penelitian Pendidikan : Kuantitatif, Kualitatif & Mixed Methode*. Kuningan. Hidayatul Quran Kuningan
- Hidayat, Syarief (2000), *Refleksi Realitas Otonomi Daerah: Tantangan Kedepan*, Jakarta: Pustaka Quantum.
- Jhingan ML, (1984). *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. Jakarta: Rajawali.
- Junaedi (2015:10). Studi kebudayaan lembaga kemasyarakatan di Indonesia. Bandung: Lubuk Agung.
- Lewin, K. (1951). *Field Theory in Social Science*. New York: Harper & Row.
- Lewis, Arthur (1965), *Development Planning*, New York: Harper & Row.
- Moleong, L. J. 2017. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Muluk, Saeful, 2008. *Panduan Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan*, Perpustakaan Nasional, Bandung.

Ratner. 2012. *Collaborative Governance Assessment*. Malaysia: CGIAR

Riyadi dan Bratakusumah, Deddy Supriyadi. (2005) *Perencanaan Pembangunan Daerah*. Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama.

Sarundajang, (2000), *Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah*, Jakarta: Penerbit Sinar Harapan.

Sedarmayanti, 2006. *Good Governance (Kepemerintahan yang Baik)* Bagian kedua. Bandung : CV.Mandar Maju.

Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Todaro, Michael P. (2000), *Economic Development (Seventh Edition)*, Reading Massachusetts: Addison-Wesley.

JURNAL / SKRIPSI / TESIS

Anggita, D., Soetriono, & Kusmiati, A. (2018). Analisis faktor produksi dan strategi pengembangan usaha tani kopi rakyat di Desa Gombengsari Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi. *Agrika: Jurnal Ilmu Ilmu Pertanian*, 12(2), 118-132. <https://doi.org/10.31328/ja.v12i2.763>.

Ansell, C. & G. A. (2007). *Collaborative Governance in Theory and Practice*. *Jurnal of Public Administration Research and Theory*. Published by Oxford University Press.

- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571. <https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>
- Arnstein, Sherry R. (1971). *Eight Rungs on the Ladder of Citizen Participation* in Edgar S. Cahn and Barry A. Passet, *Citizen Participation: Affecting Community Change*. New York: Praeger Publishers.
- Capatina, A., Bleoju, G., Matos, F., & Vairinhos, V. (2017). Leveraging Intellectual Capital Through Lewin's Force Field Analysis: The Case of Software Development Companies. *Journal of Innovation and Knowledge*, 2(3), 125- 133. <https://doi.org/10.1016/j.jik.2016.07.001>
- Emerson, K., Nabatchi, T., & Balogh, S. (2012). An Integrative Framework For Collaborative Governance. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 1-29.
- Fakhira, Rana., & Salam, Rahmat. (2023). Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Di Kelurahan Sawah Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan. *Jurnal Administrasi Publik*. Vol.1, No. 2, 143-154.
- Fatih, C. (2010). Strategi pengembangan agroindustri perikanan laut di Kabupaten Tuban. *JSEP: Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian*, 4(3), 77-88. <https://jurnal.unej.ac.id/index.php/JSEP/article/view/398>.
- Hanief, F. & Dewi, S. P. (2014). Pengaruh urban sprawl terhadap perubahan bentuk Kota Semarang ditinjau dari perubahan kondisi fisik Kelurahan Meteseh Kecamatan Tembalang. *Jurnal Ruang*, 2(1), 41-50.
- Jum, H. 2020. *Collaborative Governance dalam Pembangunan Berkelanjutan di Pelabuhan Andi Mattalatta Garongkong Kabupaten Barru*. Skripsi. Universitas Muhammadiyah Makassar: Makassar.

- Mak, A. H. N. & Chang, R. C. Y. (2019). The Driving and Restraining Forces on Environmental Strategy Adoption in AdBispreneur : Jurnal Pemikiran dan Penelitian Administrasi Bisnis dan Kewirausahaan 149 Vol.6, No. 2, Agustus 2021, DOI : <https://doi.org/10.24198/adbispreneur.v6i2.32699>, hal. 139-149 The Hotel Industry: A Force Field Analysis Approach. Journal of Tourism Management, 73, 48-60. <https://doi.org/10.1016/j.tourman.2019.01.012>.
- Malika, U. E., Tejasari, & Hani, E. S. (2012). Perumusan strategi peningkatan mutu teknik produksi ikan guramii (*Osporonemus gouramy*) berdasarkan metode Force Field Analysis (FFA). JSEP: Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian, 6(1), 12-19. <https://jurnal.unej.ac.id/index.php/JSEP/article/view/799>
- Muhammad, H. 2017. *Partisipasi Masyarakat dalam Musrenbangdes Melalui Pendekatan Kolaborasi Governance di Kabupaten Takalar*. Tesis. Universitas Muhammadiyah Makassar: Makassar.
- Retno, Susilowati, dkk. 2022. Analisis *Collaborative Governance* dalam Penyelenggaraan Musyawarah Rencana Pembangunan Desa Sungai Rambutan. *Indonesian Governance Journal*. Vol. 05. <https://doi.org/10.18196/igj.5.2.2022.96-111>.
- Rizki, Ichwanda. 2022. *Implementasi Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Kelurahan Sei Mati Kecamatan Medan Maimun Kota Medan*. Skripsi. Universitas Medan Area: Medan.
- Supriyanto, E. E., Warsono, H., & Purnaweni, H. (2021). Collaborative Governance in Investment Policy in the Special Economic Zone of Kendal Indonesia. Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences, 4(4). <https://doi.org/https://doi.org/10.33258/birci.v4i4.3454> 13697.

Syarifuddin, S. 2022. Konsep desentralisasi, dekonsentrasi dan otonomi daerah, No be6pv, OSF Preprints, Center for Open Science. <https://EconPapers.repec.org/RePEc:osf:osfxxx:be6pv>.

Terunanegara, I. P., Agusdin, & Suparman, L. (2017). Analisis kebutuhan pengembangan sumber daya manusia setelah penerapan SMM ISO 9001: 2008 di Balai Karantina Pertanian Kelas 1 Mataram. *JMM: Jurnal Magister Manajemen*, 6(4), 1-14. <http://dx.doi.org/10.29303/jmm.v6i4.202>.

Tjokrowinoto, M. 1993. Strategi Alternatif Pengentasan Kemiskinan “Makalah Untuk Seminar Bulanan P3PK”. UGM, Yogyakarta.

DOKUMEN-DOKUMEN

Badan Pusat Statistik Kota Tangerang Selatan. 2023. Kecamatan Ciputat dalam Angka. BPS Kota Tangerang Selatan.

Surat Edaran Walikota Tangerang Selatan Nomor: 050.13/4972/Bappelitbangda/2022.

ARTIKEL

Kristianto, Ari. 2022. *Jemput Bola, Kecamatan Ciputat Rutin Nyaba Kampung*. Diakses pada 5 Agustus 2022, dari <https://posrakyat.id/2022/08/05/jemput-bola-kecamatan-ciputat-rutin-nyaba-kampung/>.

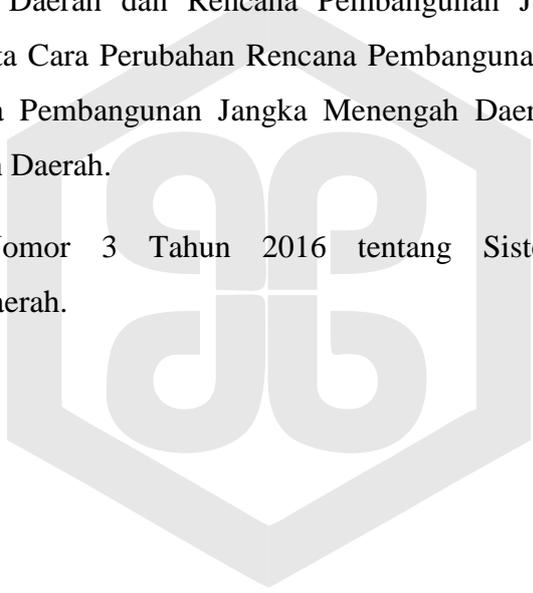
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang merupakan kerangka dasar otonomi daerah yang mengamanatkan pelaksanaan pembangunan dari bawah secara partisipatif.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah.



**POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A**